

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Peran sumber daya manusia dalam perekonomian adalah sebagai komponen penggerak dari seluruh proses aktivitas ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan inovasi. Pembangunan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan modal, tetapi juga ditentukan oleh kualitas dari tenaga kerja. Pembangunan ekonomi sendiri merupakan proses terencana yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan berkelanjutan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga mencakup perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Penyerapan tenaga kerja berarti jumlah individu yang telah terserap bekerja pada suatu sektor tertentu. Tenaga kerja dapat terserap apabila tersedia kesempatan kerja yang memadai, sehingga mampu menampung angkatan kerja secara optimal. Permintaan tenaga kerja bersifat turunan, artinya permintaan ini bergantung pada kebutuhan output yang dihasilkan (Maryati *et al.*, 2021). Ketika jumlah tenaga kerja yang terserap cukup tinggi, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyediakan kesempatan kerja memadai dan menurunkan angka pengangguran. Sebaliknya, rendahnya penyerapan tenaga kerja dapat menjadi sinyal adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja, baik akibat keterbatasan kualitas

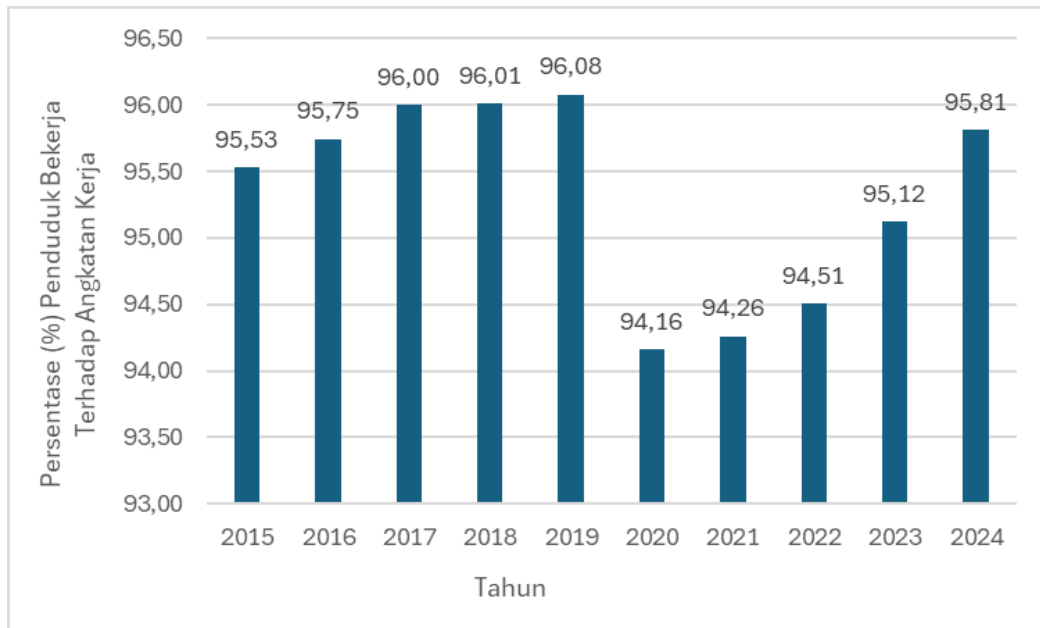
sumber daya manusia, keterbatasan investasi, maupun kebijakan upah yang kurang optimal.

Tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi di Indonesia berdasarkan data BPS per Agustus 2024 masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kondisi ini seiring dengan padatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang terpusat di wilayah tersebut. Secara nasional Jawa Timur berada pada peringkat kedua dengan jumlah penduduk bekerja mencapai sekitar 21 juta jiwa. Fakta ini menandakan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional baik dari sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, ataupun UMKM. Namun, di balik jumlah penduduk bekerja yang tinggi, Provinsi Jawa Timur masih dihadapkan pada persoalan tingginya tingkat pengangguran.

Data BPS per Agustus 2024 memaparkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur mencapai 4,19%. Angka ini mencerminkan bahwa sebagian tenaga kerja masih belum terserap secara optimal di wilayah tersebut. Sementara itu, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah perkotaan sebanyak 5,79 % lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan hanya 3,67 %, hal ini menandakan bahwa persaingan kerja di daerah perkotaan masih cukup ketat akibat tingginya konsentrasi penduduk produktif dan terbatasnya lapangan kerja. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun perekonomian Jawa Timur mengalami pertumbuhan, tetapi penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya optimal.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat kapasitas penyerapan tenaga kerja di setiap daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih merata. Jumlah penduduk yang telah terserap bekerja di

wilayah tertentu mencerminkan bahwa kemampuan ekonomi wilayah tersebut dalam menyediakan lapangan kerja yang memadai, serta menunjukkan sejauh mana sektor-sektor produktif mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.



Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Bekerja (%) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2024

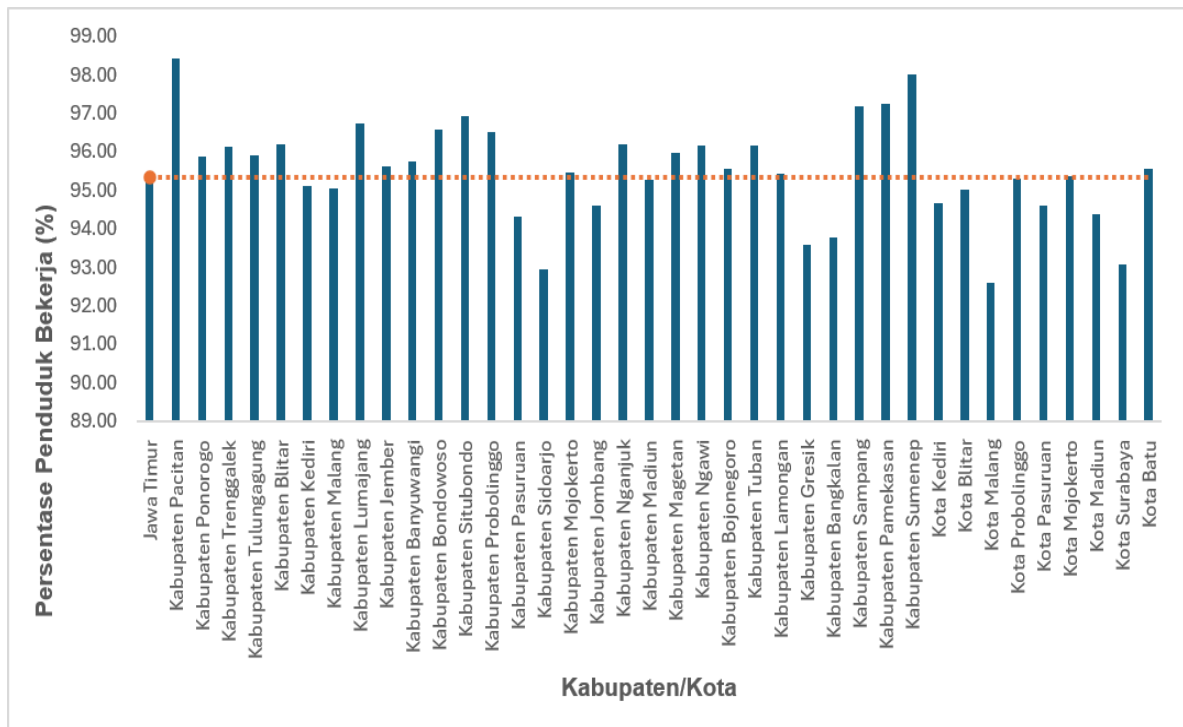
Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Gambar 1.1 menunjukkan grafik persentase penduduk bekerja di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024 yang secara umum mengalami pola peningkatan, meskipun terdapat kemerosotan pada satu periodenya. Mulai awal tahun 2015 – 2019 persentase penduduk bekerja mengalami kenaikan secara bertahap dari 95,53% menjadi 96,08%. Sementara pada tahun 2020 terjadi kemerosotan yang cukup tajam hingga mencapai sekitar 94,16%, kondisi ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 yang telah menghambat aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja pada seluruh wilayah. Selanjutnya, pada periode 2021–2024 persentase penduduk bekerja kembali mengalami pemulihan secara bertahap yang meningkat dari 94,26% pada tahun 2021 menjadi 95,81% pada

2024. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan serta pemulihan ekonomi pada semua sektor, yang akhirnya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Permasalahan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur pada tahun 2015–2024 ditandai oleh pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang meningkat lebih cepat dibandingkan penyediaan lapangan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak seimbang dengan peningkatan permintaan pada pasar tenaga kerja dan kualitas angkatan kerja sehingga penyerapannya kurang optimal. Faktanya banyak dijumpai lulusan perguruan tinggi justru dihadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan pendidikan yang lebih rendah, hal ini mengindikasikan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan dunia kerja. Akibatnya Jawa Timur masih didominasi oleh pekerja sektor informal yang lebih tinggi dibandingkan sektor formal. Sektor informal cenderung menyerap tenaga kerja tetapi dengan upah rendah, kurangnya jaminan sosial, serta produktivitas yang lemah.

Merujuk pada kondisi tersebut pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk bekerja terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, ataupun UMKM. Tingginya penyerapan tenaga kerja mencerminkan bahwa perkembangan ketenagakerjaan di Jawa Timur tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tetapi juga terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1. 2 Presentase Penduduk Bekerja (%) 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2024

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024 (data diolah)

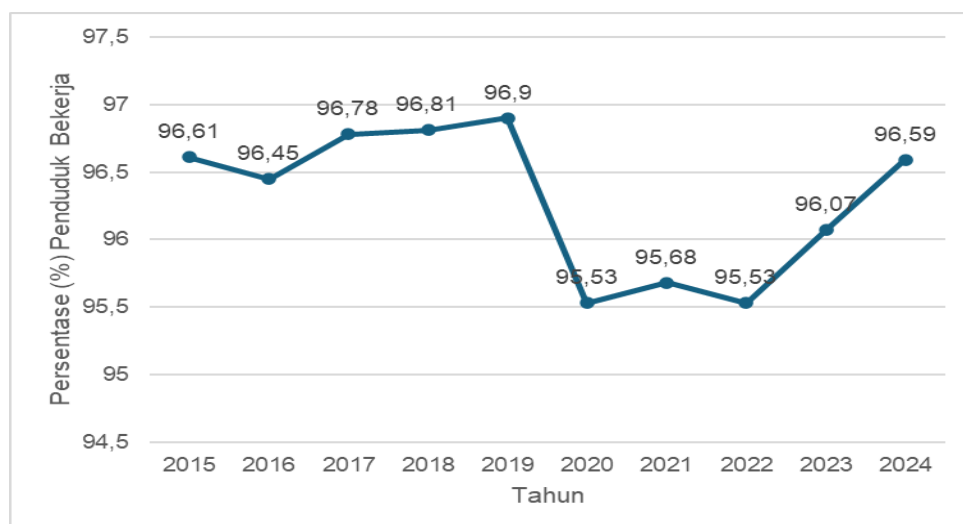
Gambar 1.2 menunjukkan persentase penduduk bekerja di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024. Garis putus-putus pada grafik menunjukkan rata-rata persentase penduduk bekerja Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 95,32%. Berdasarkan grafik terdapat 23 Kabupaten/Kota yang memiliki persentase penduduk bekerja di atas rata-rata provinsi, sedangkan 15 Kabupaten/Kota lainnya masih berada di bawah rata-rata tersebut. Kabupaten Pacitan memiliki rata-rata persentase penduduk bekerja tertinggi selama periode 2015–2024 yaitu sebesar 98,41%. Selanjutnya, Kabupaten Sumenep menempati posisi kedua sebesar 98,01%, diikuti Kabupaten Pamekasan sebesar 97,25%, Kabupaten Lumajang sebesar 96,74%, Kabupaten Situbondo sebesar 96,91% dan wilayah tertinggi lainnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar daerah di Jawa Timur telah memiliki tingkat

penyerapan tenaga kerja yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan tingkat penyerapan tenaga kerja antarwilayah yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam kemampuan masing-masing daerah menyerap angkatan kerja.

Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 tercatat sebanyak 19.367.777 jiwa, dan angka tersebut terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 23.361.110 jiwa pada 2024. Peningkatan ini menandakan bahwa secara keseluruhan kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur mengalami perbaikan tiap tahun berturut turut. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah mampu menghasilkan lapangan kerja baru dan menyerap lebih banyak tenaga kerja seiring dengan berkembangnya berbagai sektor ekonomi. Secara umum wilayah Kabupaten/Kota dengan sektor industri yang berkembang pesat umumnya memiliki potensi tenaga kerja formal yang jauh lebih besar, di mana para pekerjanya cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Sebaliknya, daerah yang memiliki struktur ekonomi yang masih bergantung pada sektor pertanian didominasi oleh tenaga kerja informal seperti petani, pekerja paruh waktu, dan pekerjaan yang tidak memiliki gaji tetap. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam pola penyerapan tenaga kerja di berbagai daerah Jawa Timur.

Penelitian ini hanya berfokus pada wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi yakni sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki struktur ketenagakerjaan relatif lebih tinggi diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang didominasi oleh sektor pertanian dan sektor Industri . Tingginya penyerapan tenaga kerja mencerminkan bahwa wilayah ini memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik dalam

menyediakan lapangan pekerjaan serta menyerap angkatan kerja secara optimal. Wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang optimal umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang beragam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja meliputi kualitas sumber daya manusia, tingkat upah, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, beberapa wilayah tersebut dipilih guna memberikan gambaran yang tepat dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penyerapan tenaga di Provinsi Jawa Timur.



Gambar 1.3 Persentase Penduduk Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%) Di 23 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2020 – 2024

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024 (data diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk bekerja di 23 kabupaten/kota di Jawa Timur selama tahun 2015–2024 cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Awal periode tahun 2015–2016 persentase penduduk bekerja mengalami penurunan dari 96,61% menjadi 96,45%. Selanjutnya, pada tahun 2017–2019 persentase penduduk bekerja kembali meningkat secara relatif stabil hingga mencapai 96,90%. Fenomena ini mencerminkan kondisi penyerapan tenaga kerja yang cukup baik. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan yang

cukup tajam hingga 95,53% akibat dari dampak pandemi Covid-19 terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja. Meskipun di tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 95,61%, namun kembali menurun di tahun 2022 menjadi 95,53%. Sementara itu, pada periode 2022–2024 terlihat adanya pemulihan bertahap yang ditandai dengan meningkatnya kembali persentase penduduk bekerja di sebagian besar kabupaten/kota.

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa 23 Kabupaten/Kota ini masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerjanya. Fenomena ini menjadi salah satu tantangan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menciptakan distribusi penyerapan tenaga kerja yang lebih merata dan stabil di tengah unggulnya kualitas sumber daya manusia serta kondisi ekonomi saat ini. Tenaga kerja akan terserap dimana sebuah lapangan pekerjaan memerlukan keahlian khusus untuk melaksanakan kegiatan ekonomi demi menghasilkan produk perusahaan. Kesempatan kerja dapat ditentukan melalui jumlah penduduk yang bekerja yang terserap, namun faktanya masih sulit tercapai karena kemampuan daerah dalam menciptakan atau menyediakan lapangan kerja masih terbatas (Biamrillah & Nurhayati, 2018).

Meskipun tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur tergolong tinggi, fenomena fluktuasi yang terjadi selama periode 2015–2024 menandakan bahwa stabilitas pasar kerja masih rentan terhadap berbagai faktor ekonomi dan sosial. Penurunan persentase penduduk bekerja tahun 2020 mencerminkan dampak guncangan ekonomi dan sosial akibat pandemi COVID-19 yang telah menghambat berbagai aktivitas ekonomi seluruh sektor maupun permintaan tenaga kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar kerja tidak hanya

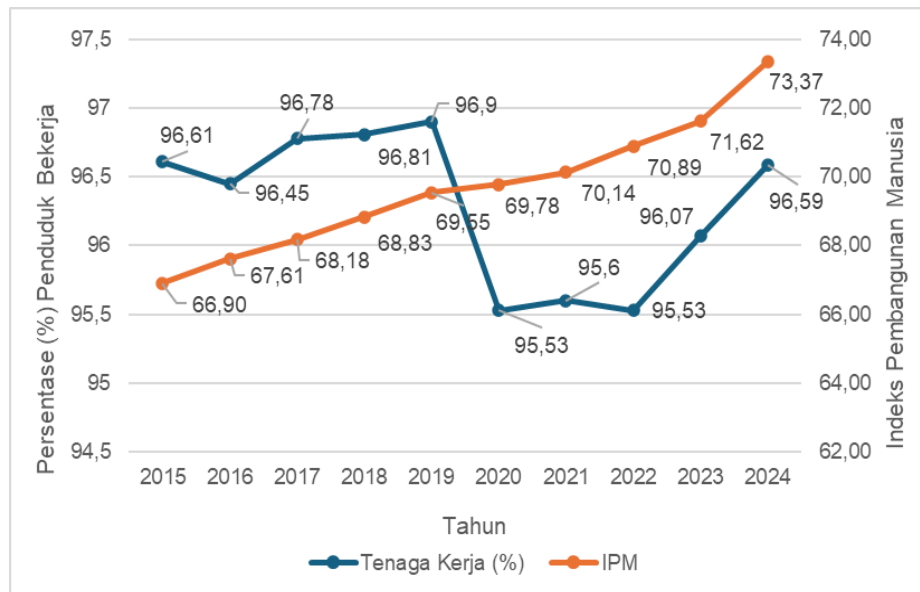
ditentukan oleh besarnya jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga oleh kemampuan tenaga kerja dalam beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi yang terjadi.

Aspek utama tenaga kerja bukan terletak pada seberapa banyak jumlahnya, melainkan pada kemampuan yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Kualitas tenaga kerja yang tinggi meliputi kemampuan, keterampilan, dan profesionalisme yang nantinya akan mendorong peningkatan produktivitas dalam proses produksi. Tenaga kerja memiliki sifat yang heterogen baik dari sisi umur, jenis kelamin, kemampuan kerja, kesehatan, dan pendidikan (Indriani, 2016). Tenaga kerja dengan usia produktif, kesehatan yang baik, serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi umumnya memiliki daya saing dan kesempatan kerja yang lebih besar dibandingkan tenaga kerja dengan karakteristik sebaliknya.

Keragaman karakteristik tenaga kerja menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menentukan tingkat produktivitas dan mendorong pembangunan ekonomi. Todaro dan Smith (2015) mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan suatu negara dalam menciptakan lapangan kerja yang produktif. IPM merupakan salah satu elemen yang dipandang sebagai indikator keberhasilan pembangunan serta tingkat hidup manusia.

IPM mencakup tiga aspek yaitu umur yang panjang, kesehatan yang baik, pendidikan, dan tingkat kehidupan yang layak, yang menjadi ukuran umum untuk menilai kualitas pembangunan manusia. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan mendorong bertambahnya kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa, sehingga IPM berperan dalam meningkatkan motivasi serta kapasitas tenaga kerja untuk mencari dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik (Bunga M.M, 2025). IPM yang lebih tinggi menandakan bahwa masyarakat mendapatkan akses

yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta kehidupan yang layak. IPM yang tinggi dapat mendorong peningkatan produktivitas serta daya saing dari tenaga kerja, yang pada akhirnya mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah.



Gambar 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) Di 23 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPS Jawa Timur, 2024 (data diolah)

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa rata rata IPM pada 23 Kabupaten/Kota mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup dan sumber daya manusia. Angka IPM mengalami peningkatan secara drastis dari sekitar 66,90 pada tahun 2015 menjadi 73,37 pada tahun 2024. Kenaikan IPM ini terjadi secara bertahap setiap tahunnya, meskipun pada periode 2019–2021 peningkatannya cenderung lebih lambat dibandingkan tahun-tahun lainnya. Fenomena keterlambatan kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19. Namun, ditahun berikutnya angka IPM kembali mengalami peningkatan yang lebih pesat hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2024

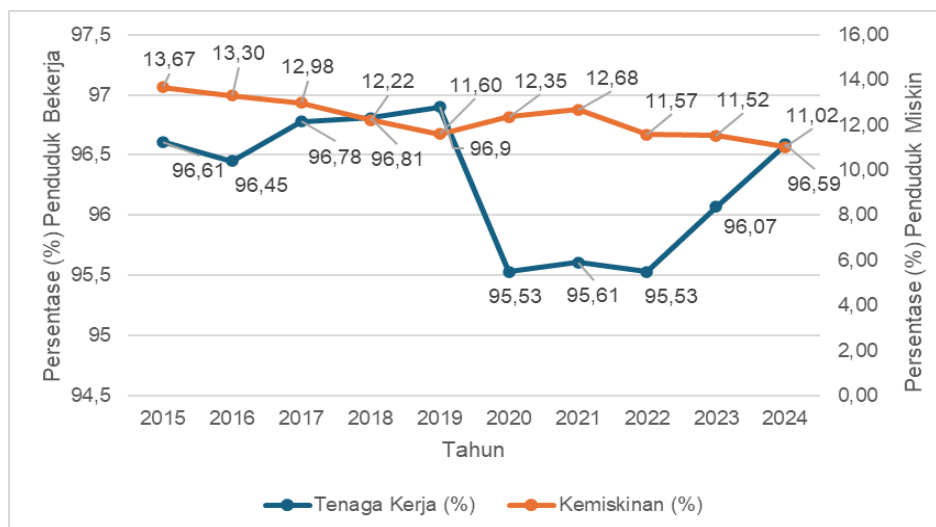
Grafik diatas memberikan gambaran bahwa angka IPM di 23 Kabupaten/Kota ini menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun kondisi tersebut tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang stabil. Sehingga pada periode yang sama persentase penduduk bekerja masih mengalami fluktuasi di beberapa periode. Adanya ketidaksesuaian dengan asumsi teori human capital yang dikemukakan oleh Schultz (1996) yang menyatakan bahwa modal manusia terbentuk melalui akumulasi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh lewat pendidikan dan pelatihan (Kholifah *et al.*, 2025). IPM memiliki hubungan positif dengan tenaga kerja dimana bentuk investasi persaingan dalam dunia kerja dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan (teknologi digital) yang nantinya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, seharusnya daerah dengan IPM tinggi memiliki kualitas modal manusia yang lebih optimal, dibandingkan dengan IPM rendah yang masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan akses.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azzahra *et al* (2023) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Heryanto *et al* (2023) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gorontalo. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Silvia & Susilowati (2023) menemukan hasil bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Selain IPM, aspek lain yang memiliki hubungan dengan penyerapan tenaga kerja yaitu tingkat kemiskinan yang dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam suatu wilayah. Tingginya

tingkat kemiskinan suatu menandakan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, keterampilan maupun kesehatan masyarakat. Sehingga, pada akhirnya dapat menurunkan produktifitas seseorang serta menghambat peluang untuk dapat terserap di pasar tenaga kerja.

Kemiskinan dianggap sebagai keadaan dimana suatu individu atau keluarga yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut mencakup pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Kemiskinan adalah kondisi kompleks yang membatasi seseorang dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja (Sajogyo., 1989 dalam Perdana, 2026). Ketika akses terhadap pendidikan dan kesehatan terbatas akan menjadikan seseorang tidak berkesempatan mendapatkan keterampilan atau *skills* yang memadai untuk kebutuhan dunia kerja. Kondisi ini dapat mengurangi produktivitas dan daya saing tenaga kerja, sehingga peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi semakin rendah.



Gambar 1.5 Persentase Penduduk Miskin (%) 23 Kabupaten/Kota Di Jawa Timur 2020 -2024

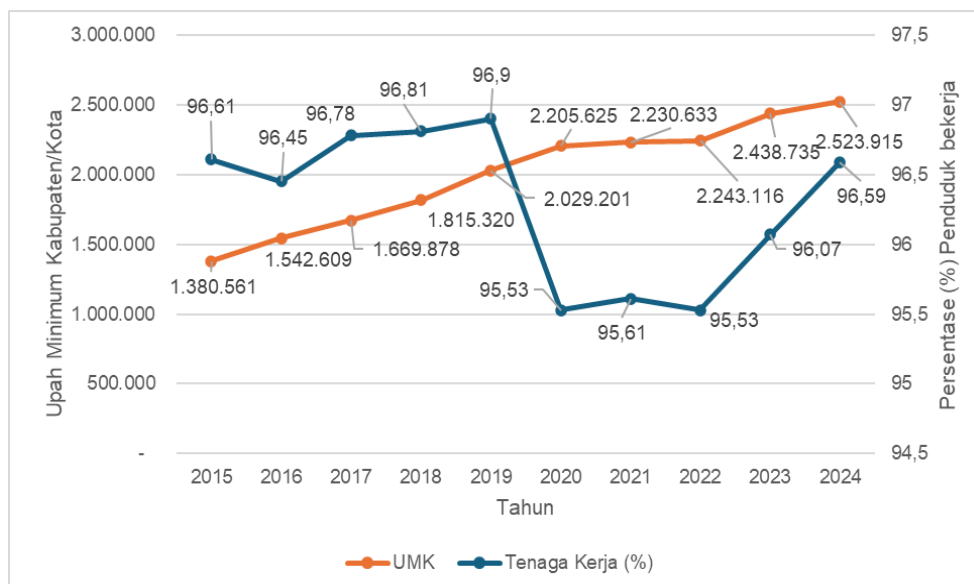
Sumber: BPS Jawa Timur, 2024 (data diolah)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa rata rata persentase kemiskinan 23 Kabupaten/Kota pada tahun 2015 – 2024 mengalami tren yang cenderung menurun, namun terdapat sedikit tren fluktuasi pada tahun tertentu. Pada awal periode 2015 – 2019 persentase kemiskinan mengalami penurunan bertahap yang stabil berada di angka 13,67% di tahun 2015 hingga mencapai titik rendah di angka 11,60% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 - 2021 terjadi kenaikan kembali menjadi sekitar 12,35% di tahun 2020 dan 12,68% di tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya dampak dari pandemi Covid-19 terlihat jelas yang menyebabkan peningkatan kemiskinan secara merata di tahun tersebut. Selanjutnya, kemiskinan kembali menurun secara bertahap di tahun 2022 – 2024 hingga mencapai angka 11,02%, yang merupakan titik terendah dalam periode tersebut. Kondisi ini menandakan adanya upaya pengurangan kemiskinan di berbagai daerah yang secara umum telah menunjukkan perbaikan.

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa rata – rata persentase kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota ini secara umum menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, namun kondisi tersebut tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang stabil. Meskipun kemiskinan mengalami penurunan secara bertahap, pada periode yang sama penyerapan tenaga kerja masih menunjukan tren yang fluktuasi. Teori lingkaran kemiskinan menyebutkan bahwa kemiskinan terjadi ketika dimana pendapatan rendah menyebabkan tabungan dan investasi rendah, sehingga menjadikan produktivitas tenaga kerja tetap rendah dan akhirnya kembali menghasilkan kemiskinan (Nurkse, 1953 dalam Wahed *et al.*, 2021). Kemiskinan memiliki hubungan berbalik dengan tenaga kerja, ketika tingkat kemiskinan menurun seharusnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, fakta yang terjadi meskipun tingkat kemiskinan cenderung

mengalami penurunan, penyerapan tenaga kerja masih menunjukkan pola fluktuatif dan tidak meningkat secara konsisten.

Selanjutnya, upah memiliki peran yang sangat penting dalam dunia kerja, sebab upah adalah tolak ukur pertama yang mempengaruhi seseorang tertarik untuk bekerja. Ketika tingkat upah minimum di suatu daerah meningkat, secara umum akan menarik minat pekerja untuk bekerja di wilayah tersebut. Teori upah efisiensi (*efficiency wage*) mengungkapkan upah naik dapat menjadikan pekerja lebih produktif. Upah dapat meningkatkan produktivitas bagi para pekerja, upah dianggap dapat memperkuat keterkaitan kerja antara perusahaan dan pekerja. Namun, sebaliknya perusahaan lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja ketika tingkat upah rendah. Keseimbangan pasar tenaga kerja berperan dalam menyesuaikan perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan, sehingga terbentuk tingkat upah dan jumlah kesempatan kerja yang seimbang (Borjas,2020).



Gambar 1.6 Upah Minimum Kabupaten/Kota (Rupiah) 23 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024 (data diolah)

Gambar 1.5 menunjukkan bahwa rata- rata UMK pada 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan bertahap dan stabil selama periode 2015 – 2024. Besaran UMK mengalami peningkatan secara drastis dari Rp. 1.380.561 pada tahun 2015 menjadi 2.523.915 pada tahun 2024. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan hidup layak (KHL), pertumbuhan ekonomi daerah, serta kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan upah minimum guna menjaga daya beli pekerja dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan inflasi, produktivitas tenaga kerja, serta perkembangan sektor industri dan usaha dari tahun ke tahun juga turut mendorong penyesuaian tingkat upah minimum. Fenomena ini mencerminkan bahwa semakin bertambahnya tahun aktivitas ekonomi, biaya hidup, dan produktivitas di wilayah tersebut semakin meningkat.

Grafik diatas memberikan gambaran bahwa rata – rata besaran UMK di 23 Kabupaten/Kota ini mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, namun kondisi tersebut tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang stabil. Ketika upah meningkatkan suatu pekerjaan menjadi lebih berharga, sehingga calon tenaga kerja terpengaruh untuk memanfaatkan waktu kerja dengan lebih efektif dan meningkatkan kinerja mereka (Borjas, 2020). Upah yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan motivasi, semangat kerja, dan komitmen pekerja terhadap pekerjaannya. Seharusnya, UMK memiliki hubungan positif dengan tenaga kerja kenaikan upah dapat mendorong tenaga kerja untuk lebih fokus, disiplin, dan efisien yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Namun, faktanya persentase penduduk bekerja masih mengalami tren fluktuasi pada periode yang sama.

Penelitian sebelumnya oleh Ratnasari (2021) menyatakan bahwa kenaikan UMK mencerminkan kekuatan ekonomi suatu daerah dan tingkat produktivitas

tenaga kerjanya. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa UMK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Begitu juga pada penelitian (Angkat *et al.*, 2024) mengungkapkan bahwa variabel UMR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja. Sementara hasil dari penelitian (Damayanti, 2024) mengatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi unsur kebaruan (*novelty*) penelitian. Perbedaan tersebut terletak pada penggunaan variabel kemiskinan sebagai salah satu variabel independen yang dianalisis pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji hubungan sebaliknya, yaitu dengan menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel independen yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Sementara, pada penelitian ini menempatkan kemiskinan sebagai variabel independen untuk menganalisis pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini, memberikan sudut pandang yang berbeda dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel tersebut. Perbedaan kedua terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian ini secara khusus berfokus wilayah yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024 yang berjumlah 23 Kabupaten/Kota. Sedangkan pada penelitian terdahulu umumnya menggunakan seluruh wilayah administratif.

Beberapa fenomena yang terjadi menandakan bahwa kondisi peningkatan IPM, UMK serta penurunan Kemiskinan tidak selalu sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Maka dari itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk menganalisis pengaruh dari variabel - variabel tersebut terhadap penyerapan

tenaga kerja di 23 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam rentang waktu 2015 hingga 2024. Sehingga, peneliti tertarik untuk membahas mengenai “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Dan Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 23 Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015 – 2024”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh IPM, Kemiskinan, UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di 23 Kabupaten/Kota Jawa Timur selama periode 2015 – 2024?
2. Bagaimana pengaruh IPM, Kemiskinan dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di 23 Kabupaten/Kota Jawa Timur selama periode 2015 – 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah IPM, Kemiskinan, UMK berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di 23 Kabupaten/Kota di Jawa Timur selama periode 2015 – 2024?
2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh IPM, Kemiskinan, UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di 23 Kabupaten/Kota Jawa Timur selama periode 2015 – 2024?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan penetapan upah minimum guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dampak kemiskinan, dan upah minimum terhadap peluang kerja agar masyarakat dapat lebih mempersiapkan diri untuk bersaing di pasar tenaga kerja.